



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 3/Kep.Pimp./2022

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Tugas 2022-2024, maka perlu ditetapkan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi, dan dilaporkan dalam rapat paripurna serta ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Susunan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Tugas 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and does not form any recognizable words or sentences.]

3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management. It discusses how advanced software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It stresses the importance of implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document explores the ethical implications of data collection and analysis. It discusses the need for transparency in data practices and the importance of obtaining informed consent from individuals whose data is being collected.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of a data-driven approach and the need for continuous improvement in data management practices.

7. The final part of the document includes a list of references and a glossary of key terms. This section is intended to provide additional context and resources for readers interested in the topics discussed in the document.

- Memperhatikan : a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5/SB/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024;
- b. Keputusan Rapat Internal Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 Maret 2022 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Pimpinan dan susunan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Tugas 2022-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kecuali ditentukan lain oleh anggota komisi bersamaan dengan terjadinya perubahan susunan keanggotaan komisi.
- KETIGA** : Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi.
- KEEMPAT** : Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 7 Maret 2022

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua

SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua

INDRA DT. RAJOLESILO

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate documentation and receipts.

3. The second section outlines the various methods used to collect and analyze financial data.

4. These methods include direct observation, interviews, and the use of specialized software tools.

5. The third part of the document provides a detailed overview of the data analysis process.

6. This process involves identifying trends, patterns, and anomalies within the collected data.

7. The fourth section discusses the challenges associated with data collection and analysis.

8. These challenges include data quality issues, incomplete information, and the complexity of the data itself.

9. The fifth part of the document offers strategies to overcome these challenges and improve the accuracy of the results.

10. These strategies include implementing strict data quality control measures and using advanced analytical techniques.

11. The sixth section provides a summary of the key findings and conclusions drawn from the study.

12. The findings indicate that maintaining accurate records and using robust analytical methods are crucial for successful data analysis.

13. The seventh part of the document discusses the implications of these findings for future research and practice.

14. It is recommended that researchers continue to explore new methods and tools to further enhance the accuracy and efficiency of data analysis.

15. The eighth section provides a list of references and sources used in the study.

16. These references include academic journals, books, and other relevant publications in the field.

17. The ninth part of the document contains a list of appendices and supplementary materials.

18. These materials provide additional details and data related to the study, including raw data and detailed calculations.

19. The tenth and final section of the document provides a concluding statement and a list of contact information.

20. The authors express their gratitude to the funding agencies and participants who made this study possible.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 3 / Kep.Pimp/ 2022
 TANGGAL : 7 Maret 2022

PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN TAHUN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN

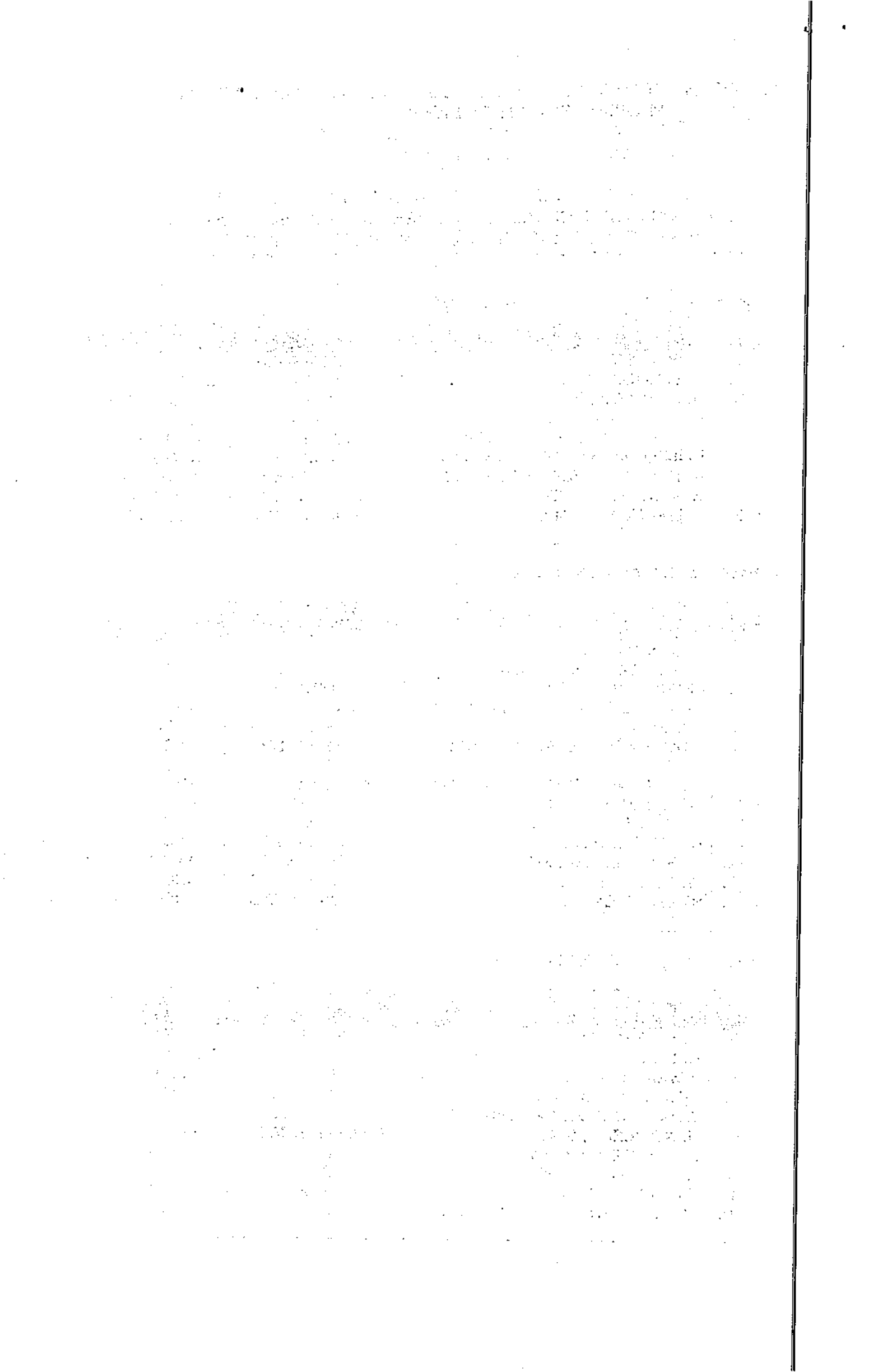
No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SAWAL, SH	F.PPP-NASDEM	KETUA
2.	H. MAIGUS NASIR, S.Pd.	F.PAN	WAKIL KETUA
3.	H. RAFDINAL, SH	F.PKS	SEKRETARIS
4.	DESRIO PUTRA, ST	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	Hj. YUNISRA SYAHIRAN, S.Pd	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	H. IRZAL ILYAS DT.LAWIK BASA, MM	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, MM.	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
8.	H.M. SYAFRIL HUDA	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
9.	LELIARNI, S.Pd, M.Si	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

KOMISI II BIDANG EKONOMI

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. MOCHKLASIN, S.Si	F.PKS	KETUA
2.	Drh. NELA ABDIKA ZAMRI	F.P. GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	JEFRI MASRUL, SE.	F.P.DEMOKRAT	SEKRETARIS
4.	NURKHALIS DT. BIJO DIRAJA, S.Pt	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	JEMPOL	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	MUCLHIS YUSUF ABIT, ST.MM	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
7.	M.IHPAN	F.PKS	ANGGOTA
8.	Ir. H. ARKADIUS DT.INTAN BANO,MM.MBA.	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
9.	MUHAMMAD IKHBAL, SE	F.PAN	ANGGOTA
10.	H. MUZLI M. NUR, S.Pd	F.PAN	ANGGOTA
11.	H. LAZUARDI ERMAN, SH.	F.P.GOLKAR	ANGGOTA
12.	H. BAKRI BAKAR, SH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	FIRDAUS, SH.I.	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
14.	SYAMSUL BAHRI	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

KOMISI III BIDANG KEUANGAN

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. ALI TANJUNG, SH	F.P.DEMOKRAT	KETUA
2.	H. RAHMAT SALEH, S.Farm.	F.PKS	WAKIL KETUA
3.	IRWAN AFRIADI.	F.PPP-NASDEM	SEKRETARIS
4.	ISMUNANDI SOFYAN SE	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	JASMA JUNI DT. GADANG, SE	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	H. NOFRIZON, S.Sos	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	H. DODY DELVY, SE.	F.PAN	ANGGOTA
8.	H. AHMAD RIUS, SH	F.PAN	ANGGOTA
9.	ZARFI DESON, SH	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
10.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA



KOMISI IV BIDANG PEMBANGUNAN

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH. M.Si	F.P.GOLKAR	KETUA
2.	H. BUKHARI DT.TUO, SE	F.PAN	WAKIL KETUA
3.	SUHARJONO	F.P.DEMOKRAT	SEKRETARIS
4.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	KHAIRUDIN SIMANJUNTAK	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	MESRA	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
7.	Drs. H NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt.	F.PKS	ANGGOTA
8.	H. BUDIMAN, S.Ag, MM.	F.PKS	ANGGOTA
9.	H.M. NURNAS, ST	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	Hj. ARTATI, SH.MH	F.PAN	ANGGOTA
11.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIS	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
12.	H. TAUFIK SYAHRIAL, SH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	IMRAL ADENANSI, SH.MH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	RICO ALVIANO RAJO NAN SATI, ST	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

KOMISI V BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. DASWANTO, SE	F.PAN	KETUA
2.	Hj. AIDA, SH	F.P.DEMOKRAT	WAKIL KETUA
3.	DR. H. HARDINALIS KOBAL, SE.MM	F.P.GOLKAR	SEKRETARIS
4.	Drs. H. SYAFRUDDIN PUTRA DT. SUNGGUNO, M.Si	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	H. HIDAYAT, SS.MH	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	MARIO SYAH JOHAN	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
7.	H. GUSTAMI HIDAYAT, S.Pt, MP.	F.PKS	ANGGOTA
8.	H. MUHAMMAD RIDWAN, S.IP.	F.PKS	ANGGOTA
9.	H. ISMET AMZIS, SH.	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	MUHAYATUL, SE. M.Si	F.PAN	ANGGOTA
11.	H. AFRIZAL, SH.MH	F.P.GOLKAR	ANGGOTA
12.	H. DASWIPETRA DT. MANJINJIANG ALAM, SE.M.Si	F. PPP- NASDEM	ANGGOTA
13.	DONIZAR	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



SUPARDI

Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua

SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua

INDRA DT. RAJOLELO

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key personnel. Secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third section provides a detailed analysis of the findings. It shows that there is a significant correlation between the variables studied. The data indicates that as one variable increases, the other tends to decrease, suggesting an inverse relationship. This finding is supported by statistical tests and is consistent with previous research in the field.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the research findings. It suggests that organizations should implement stricter controls to prevent data manipulation and ensure the integrity of their records. Additionally, it recommends regular audits to identify any discrepancies early on.